

Konflik dan Perubahan Sosial

Catatan untuk buku Meretas Jalan
Konflik Kehutanan



INDONESIA
MAJU

BEDAH BUKU

**MERETAS JALAN
KONFLIK KEHUTANAN**

Narasumber
Dr. Sulisty Ekawati
(Peneliti Pusat Litbang SERAPI)

 **26 AGUSTUS 2020**
09.00 - 11.00

Registrasi:
<https://bit.ly/MeretasJalan>

Moderator:
Luis Santika Ginaga S.Sos, M.Si

 wa: 62 812 5025 2040
 luis@ipah.com

Didik Suharjito
Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB
University
Rabu, 26 Agustus 2020

Pembahas



Prof. Dr. Ir. Didik Suharjito, M.Sc.
(Direktur, Perencanaan Bogor)

Moderator



Dr. Yaguk Siswiyanti, S.Hut, M.Si
Kabag. Evaluasi, Diseminasi dan Perpartokasian
(Sekretariat Badan Litbang dan Inovasi, KLHK)



Bedah Litbang dan Inovasi
Kementerian LHK



KLHK



FORDA, MAJ



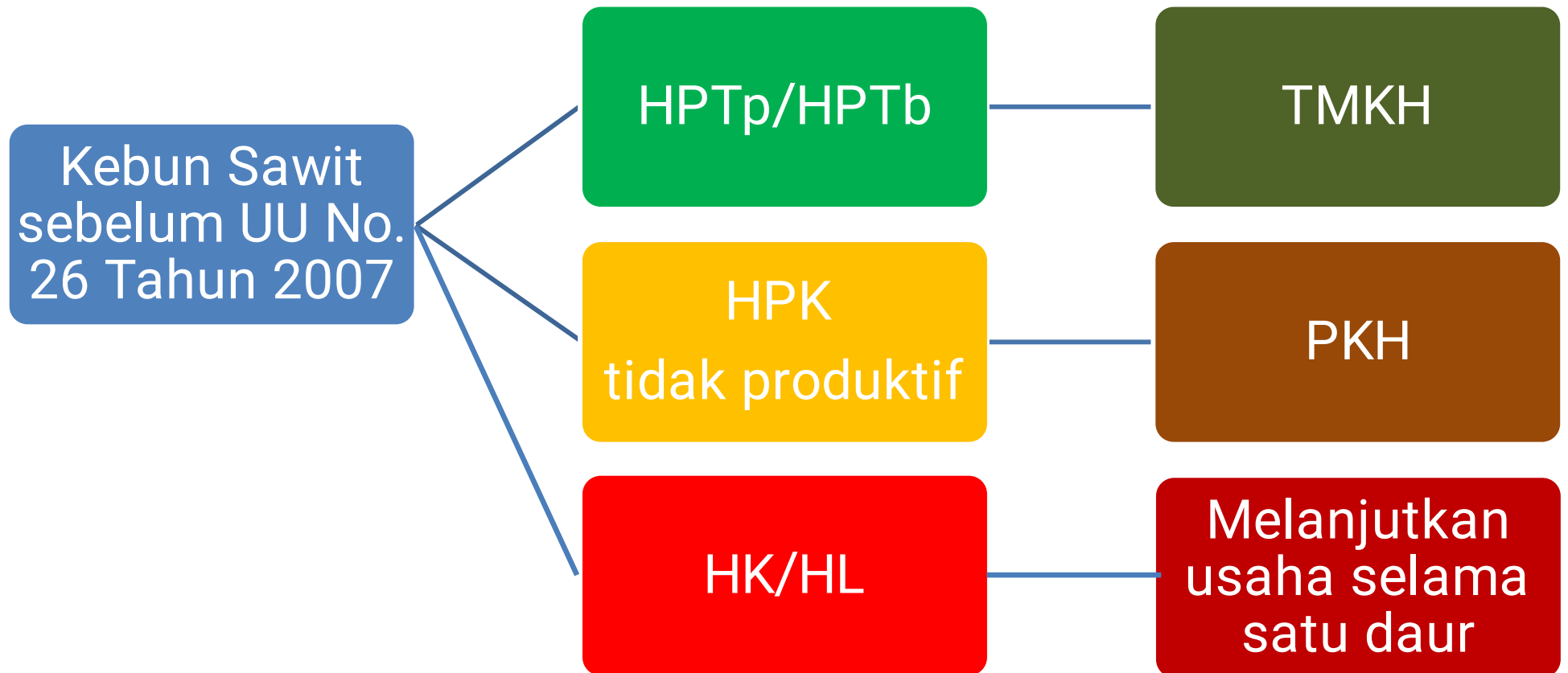
Bedah Litbang dan Inovasi
Perencanaan LHK

Kebijakan Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan

No.	Peraturan Perundang-undangan	Ketentuan yang relevan
1	PP No. 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan fungsi kawasan hutan	Proses tukar menukar kawasan hutan dan pelepasan kawasan hutan (lihat gambar dan Permen LHK No. P.96 tahun 2018 jo. P.50 Tahun 2019)
2	PerPres No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	Kebun sawit rakyat di dalam kawasan hutan dapat diselesaikan dengan PerPres ini; Tidak mengatur tentang perkebunan (sawit) swasta
3	InPres No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian Perkebunan Sawit di dalam kawasan hutan dengan pilihan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kembali sebagai kawasan hutan; 2. Penetapan sebagai tanah negara; 3. Langkah hukum dan/atau tuntutan ganti rugi. • Mengacu pada Ps 51 PP No. 104 Tahun 2015; • Pembinaan petani untuk peningkatan produktivitas sawit; dan • Memastikan penerapan standar ISPO

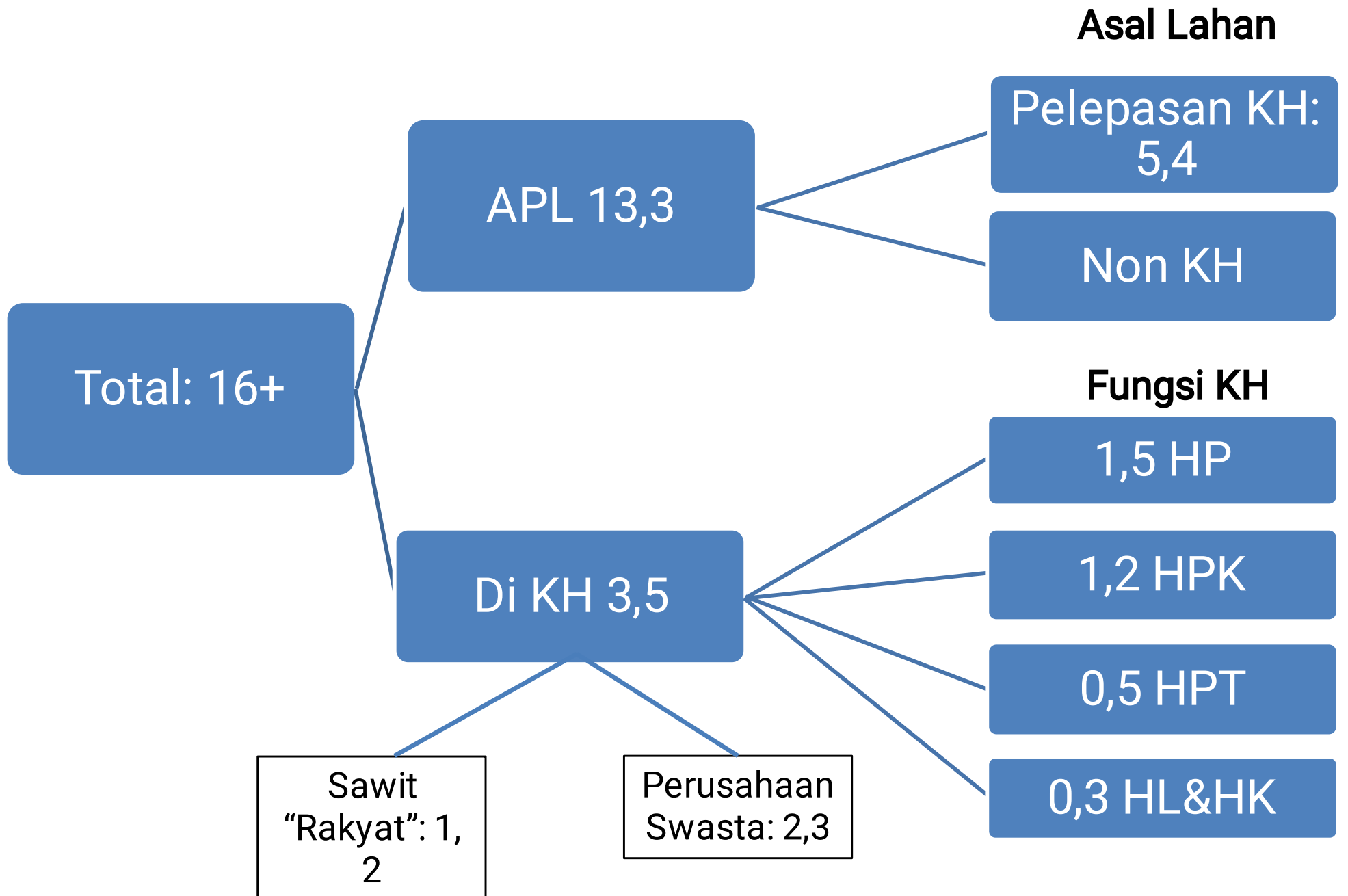
No.	Peraturan Perundang-undangan	Ketentuan yang relevan
1	Permen LHK No. P.96/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi	Pelepasan HPK tidak produktif untuk perkebunan maks 60.000 Ha per perusahaan/grup (tebu: 100ribu Ha);
2	Permen LHK No. P.50/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Perubahan atas Permen LHK No. P.96/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018	

PP No. 104 Tahun 2015 Ps 51

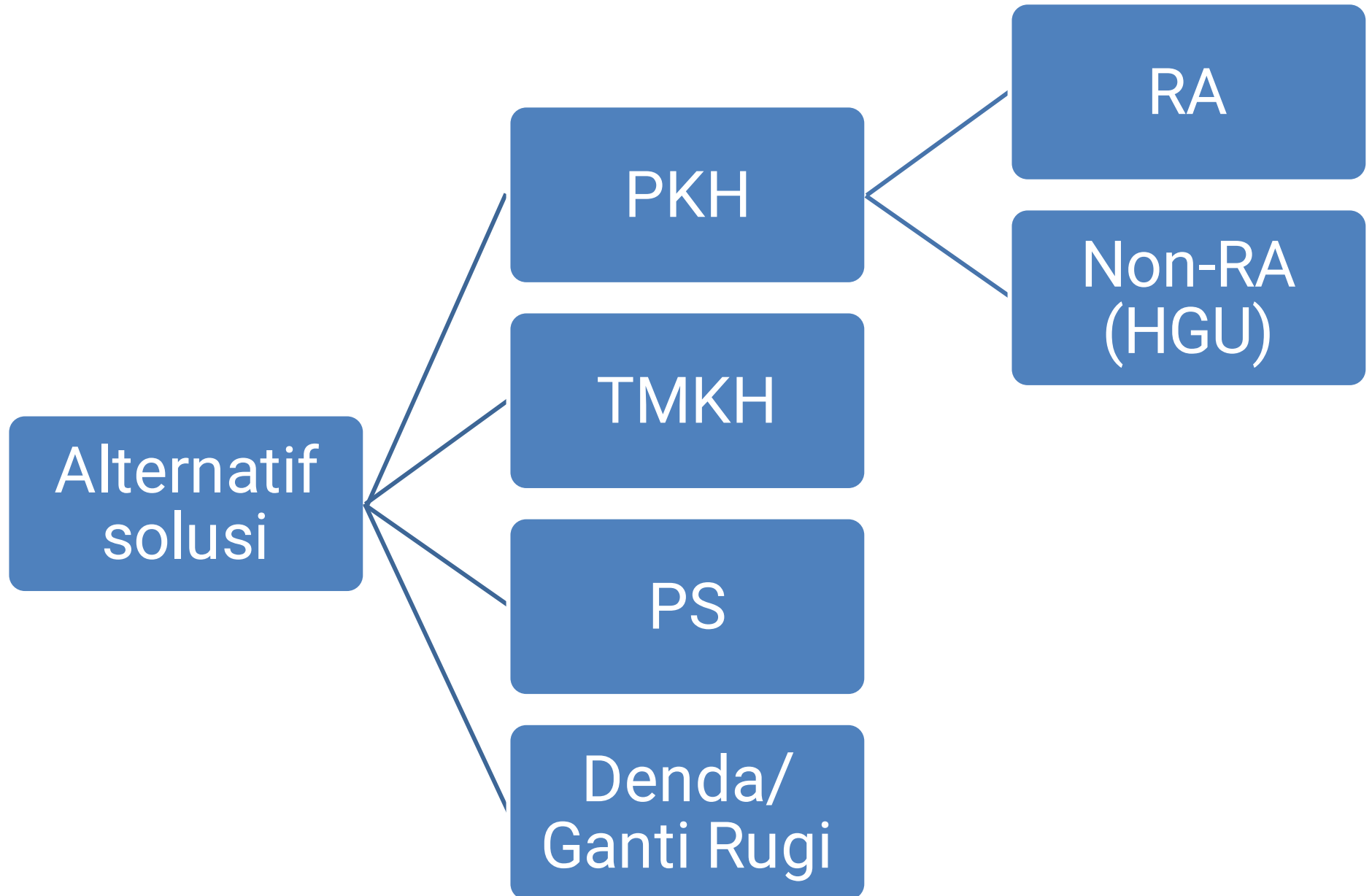


No.	Peraturan Perundang-undangan	Ketentuan yang relevan
4	PerPres No. 86 TAHUN 2018 tentang REFORMA AGRARIA	
5	Permen LHK No. P.17/ MENLHK/SETJEN/ KUM.1/5/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan untuk Sumber TORA	Kebun sawit rakyat di dalam kawasan hutan dapat menjadi TORA
6	Permen LHK No. P.83/ MENLHK/SETJEN/ KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial	Ps 56 (5) Pemegang PS dilarang menanam kelapa sawit di areal hak atau izinnya. Ps 65 (h) dalam hal di areal PS atau dalam usulan PS telah ada <u>tanaman sawit</u> , sejak Permen ini diperbolehkan selama 12 (dua belas) tahun sejak masa tanam dan di antara tanaman sawit ditanam pohon berkayu paling sedikit 100 pohon per hektar.

Luas Kebun Sawit (juta Ha)



Alternatif solusi okupasi awit di kawasan hutan (berdasar kebijakan)



Langkah Aksi Kolektif solusi konflik Kawasan Hutan

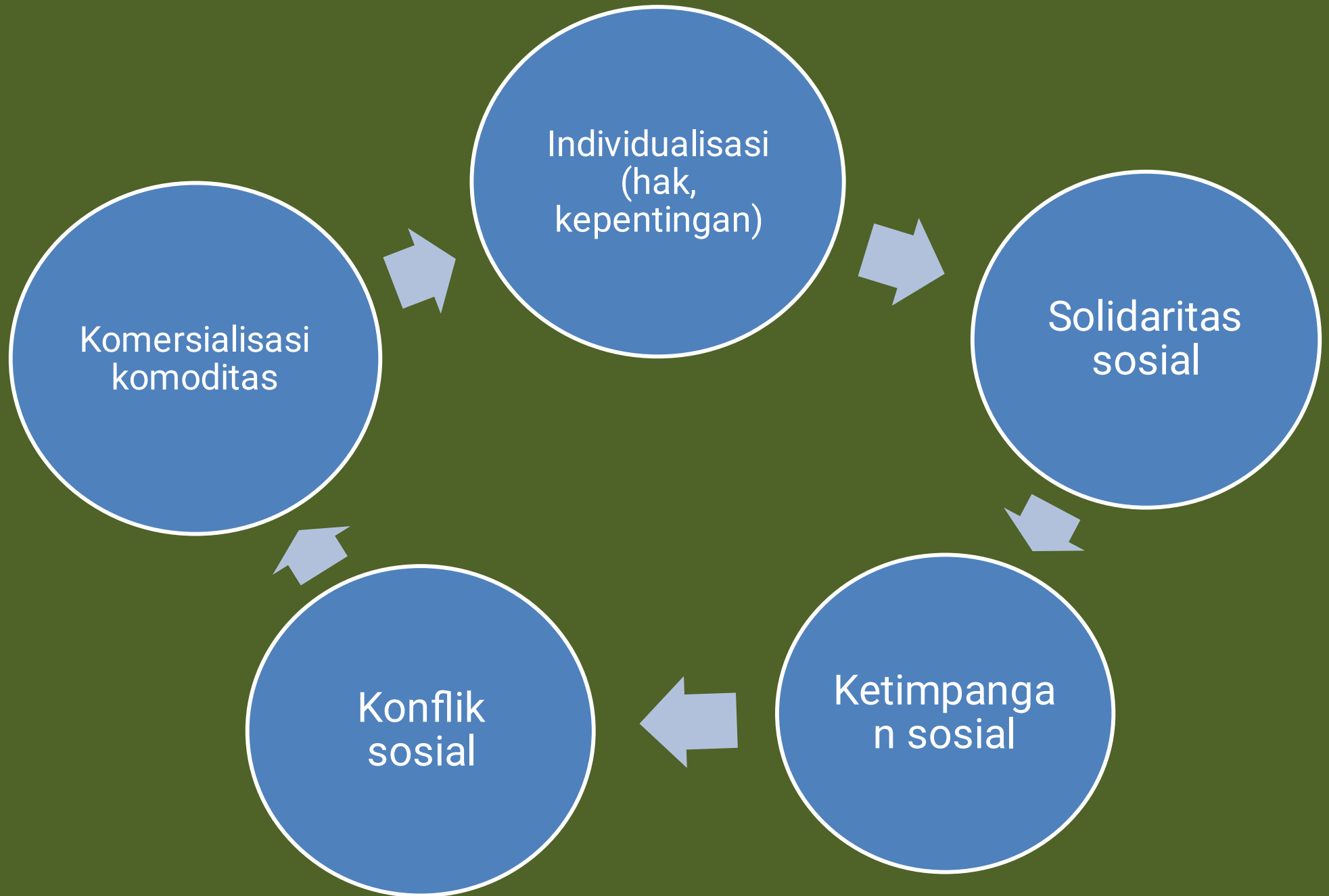
1. Pemetaan Penguasaan lahan konflik:
 - Subyek okupasi lahan:
 - masyarakat adat, masyarakat setempat non MHA; masyarakat pendatang/ luar desa; swasta;
 - Kondisi obyek kawasan hutan:
 - Luas penguasaan lahan
 - Waktu awal okupasi lahan
 - Landasan hak/akses lahan
 - Fungsi KH
 - Legalitas okupasi lahan

2. Analisis tipologi/ kategorisasi subyek & obyek;
3. Komitmen para pihak;
4. Mengambil konsensus pilihan;
5. Tindakan operasional di lapangan:
 - 1) Pelepasan (HGU, TORA), TMKH, PS;
 - 2) Penguatan kapasitas petani (kelembagaan, manajemen, teknologi);
 - 3) Kolaborasi atau kemitraan swasta-masyarakat
6. Segera dilakukan komunikasi intensif para pihak
7. Penguatan peran KPH (kewenangan, SDM, infrastruktur)

Siklus konflik dan perubahan sosial



Siklus konflik dan perubahan sosial



Siklus konflik dan perubahan sosial



Siklus konflik dan perubahan sosial



Beberapa Konsep Penting

1. Kapitalisme

2. Liberalisasi, neoliberalisme

- Pengurangan/penghapusan hak-hak pekerja
- Penurunan peran regulasi pemerintah
- Komodifikasi dan privatisasi SDA
- Privatisasi layanan public

3. Globalisasi:

- Deregulasi pasar finansial
- Deregulasi perdagangan internasional
- Proses produksi dan pemasaran: lokasi produksi, strategi dan teknologi pemasaran

Globalisasi Pertanian

- Liberalisasi perdagangan
- Korporasi global
- Penguasaan seluruh rantai komoditas...hulu-hilir
- Penghapusan subsidi
- Ketergantungan pada pasar dunia

Kajian Agraria

- Bernstein (2010):
 - Struktur kepemilikan
 - Hubungan kerja
 - Nilai lebih (penambahan nilai) dari proses produksi
 - Penggunaan nilai lebih...akumulasi kapital